

ABSTRAK

Tujuan Penelitian adalah: 1) Untuk menjelaskan dan menganalisis tentang Bagaimana kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba, apakah sebagai korban atau sebagai pelaku. 2) Bagaimana Pengaturan regulasi yang ideal terkait kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba yang berbasis *value of justice*. Dengan tujuan tersebut maka masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba, apakah sebagai korban atau sebagai pelaku? 2) Bagaimana Pengaturan regulasi yang ideal terkait kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba yang berbasis *value of justice*? Dengan perumusan masalah tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginterpretasikan, menilai dan mengevaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Terdapat konflik norma di dalam aturan yang mengatur perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana yang ancamannya diatas 7 tahun pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dampaknya dapat membuat hakim melakukan penafsiran masing-masing dalam menjatuhkan vonis terhadap anak pelaku yang harusnya diberikan perlindungan, di sisi lain aturan perlindungan anak sangat menekankan bahwa anak tidak boleh dikurangi apalagi dirampas kemerdekaan hidupnya; 2) Di Indonesia sendiri kita mengenal adanya diversi sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan ada syarat yang menjadi tolak ukur terkait tata cara mendapatkan anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba yaitu di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan seorang residivis yang termuat dalam Pasal 7 ayat Sementara ancaman yang dimuat dalam nomenklatur frasa sanksi di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menetapkan sanksi yang sangat tinggi karena adanya jumlah maximum dan minimum maka persoalannya bukan terletak pada undang-undang akan tetapi yang menjadi persoalan adalah tentang penerapan dari suatu penegakan hukum itu sendiri, artinya *value of justice* itu bukan terletak dan berada di undang-undang itu sendiri akan tetapi berada pada penegak hukum yang harus mempunyai integritas, moralitas dan tidak arogan dalam menerapkan dan menjatuhkan hukuman itu sendiri.

Kata Kunci: *Anak, Tindak Pidana, Narkoba*

ABSTRACT

The research objectives are: 1) To explain and analyze the position of children as perpetrators of narcotics crimes, whether as victims or as perpetrators. 2) What are the ideal regulatory arrangements regarding the position of children as perpetrators of narcotics crimes based on value of justice. With this aim, the issues discussed are: 1) What is the position of the child as a perpetrator of narcotics crime, whether as a victim or as a perpetrator? 2) What are the ideal regulatory arrangements regarding the position of children as perpetrators of narcotics crimes based on value of justice? With the formulation of the problem, the research method used is normative juridical research with a statutory approach (statute approach), conceptual approach (conceptual approach), historical approach (historical approach), and case approach (case approach). The legal materials collected are: primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Analysis of the collected legal materials is done by interpreting, assessing and evaluating. The results of the study show that: 1) There is a conflict of norms in the rules governing the protection of child offenders whose threats are over 7 years in Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System with Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The impact can make judges do their own interpretation in imposing a verdict on the perpetrator's child who should be given protection, on the other hand the child protection rules place a strong emphasis on that children should not be reduced let alone deprived of their life's independence; 2) In Indonesia itself, we recognize that there is diversion as stipulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. It is explained that there are conditions that become benchmarks related to procedures for obtaining children as perpetrators of narcotics crimes, namely under 7 (seven) years and not a recidivist contained in Article 7 paragraph While the threat contained in the nomenclature of the phrase sanctions in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics stipulates very high sanctions because there is a maximum and minimum amount, the problem lies not in the law but the problem is about the application of a law enforcement itself, meaning that the value of justice does not lie and is in the law itself but is in the law enforcers who must have integrity, morality and not be arrogant in implementing and imposing the punishment itself.

Keynote: *Child, Crime, Narcotics.*